



Kota Yogyakarta 50 Tahun Lalu

SEBUAH dokumen berjudul 'Buku I B Naskah Rapat Kerja Rukun Kampung se Kotamadya Yogyakarta' dapat menjadi potret dinamika Kota Yogyakarta selama 50 tahun terakhir. Dokumen tersebut merupakan bundel dari materi yang disajikan dalam Rapat Kerja Rukun Kampung (RKRK) pada 10 - 13 April 1972 di Sasana Hinggil Dwi Abad. RKRK menancangkan pola 3T, yaitu: tertib kampung, tertib bertetangga, dan tertib keluarga untuk mencapai Kampung Bahagia.

Dokumen setebal 246 lembar dalam ukuran folio dengan jenis kertas ada yang buram untuk materi yang berisi uraian, sedangkan yang HVS tebal berisi gambar-gambar materi presentasi narasumber. Beberapa naskah ketikan atau stensilan, mulai agak kabur. Dalam hal penulisannya masih menggunakan ejaan lama sebelum berlakunya EYD.

Menarik

Ada banyak hal menarik dari dokumen ini untuk dikomunikasikan kepada publik. Secara sosiohistoris, dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kehidupan sosial masyarakat maupun pemerintahan Kota Yogyakarta pada masa lalu.

Dilihat dari aspek isi materi yang terkompilasi dalam dokumen RKRK 1972, dapat dipilah menjadi empat kategori. Pertama, materi yang bersifat umum terkait dengan pembangunan desa/kampung. Terdiri dari: (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung, suatu pembahasan dari segi sosial ekonomis; (2) komunikasi dan kepemimpinan; (3) peranan penerangan dalam masa pembangunan; (4) garis-garis pokok dari pada pelaksanaan pembangunan masyarakat desa/kampung; dan (5) pemeliharaan ayam dengan cara potstal.

Kedua, jenis materi yang disampaikan pimpinan kantor di lingkungan Kotamadya Yogyakarta. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 1965 tentang Susunan Adminis-

Darmanto

trasi, Kantor dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotapraja Jogjakarta terdapat dua sekretariat dan 17 kantor. Dari jumlah tersebut ada 15 kantor yang materi presentasinya ada dalam kompilasi dokumen RKRK, dan satu sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD Kota. Adapun 15 kantor yang materinya termuat dalam Dokumen RKRK, yaitu: Kantor Tata Pemerintahan, Perekonomian, Penghasilan, Peternakan, Koperasi Pertanian Rakyat, PD dan K, Kesehatan, Urusan Perumahan, Urusan Pegawai, Pekerjaan Umum, Perencanaan Kota, Urusan Penduduk, Urusan Tanah, dan Kantor Keuangan.

Ketiga, jenis materi yang disampaikan instansi vertikal. Ada beberapa instansi vertikal yang terlibat dalam RKRK, yaitu: Kantor Sensus (BPS), Direktorat Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Direktorat PKAK Departemen Sosial, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri, dan Markas Resort Hansip/Wanra Kotamadya Yogyakarta.

Keempat, jenis informasi tentang regulasi yang terdiri dari dua kategori. Kategori pertama, regulasi yang dibuat Pemerintah Kotamadya Yogyakarta, yaitu salinan: (1) Penetapan Walikota Nomor 12/1969 tentang Pembentukan Kantor Tata Pemerintah Kotamadya; (2) SK Wali Kota No. 58/K.D./1972 tentang Penunjukan Kepala Seksi Bagian Rumah Tangga Balai Kota Kotamadya; (3) Penetapan Walikota No. 13 Tahun 1969 tentang Perubahan Tarif Biaya tempat penjualan di pasar-pasar Kotamadya; (4) Penetapan

Walikota Nomor 02 Tahun 1970 tentang Perubahan Tarif/biaya sewa toko-petak di lingkungan pasar dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta; (5) Pengumuman No. 1/Pang/UPK/1969 dari Kepala Urusan Pasar. Adapun kategori kedua berupa daftar regulasi di bidang Kesehatan.

Diarahkan

Dilihat dari nomenklatur organisasi pemerintahan Kotamadya Yogyakarta pada waktu itu, sebagian besar masih diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bersifat langsung. Perhatian terhadap bidang pertanian rakyat, peternakan, dan koperasi masih sangat besar sehingga menjadi kantor tersendiri. Pelayanan jasa seperti perhubungan, komunikasi dan informatika, pariwisata, perpustakaan, dan kearsipan belum mendapat perhatian.

Jika dokumen RKRK 1972 dijadikan potret Kota Yogyakarta 50 tahun lalu, maka tidak perlu ragu untuk menyimpulkan bahwa capaian kemajuannya sangat luar biasa.

**) Darmanto, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).*

Pojok KR

Pelaku Klithih 'gir maut' akhirnya dibekuk.
 -- Proses hukum, agar menghasilkan efek jera.

Demo mahasiswa diwarnai insiden.
 -- Waspada! penyusup.

Tradisi balon terbang saat hari raya minta dilarang.
 -- Untuk keselamatan angkutan udara yang mulai bangkit.

Beraba

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005